

## 5. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Shalippe konsep “Pembangunan Masyarakat” dengan “Pemberdayaan Masyarakat” serta “Pengembangan Masyarakat” pada dasarnya serupa atau setara. Perkembanganb teori pembangunan itu di mulai dari praktek, yaitu kebutuhan yang dirasakan di dalam masyarakat terutama dalam situasi social yang dihadapi di dalam Negara-negara yang menghadapi perubahan social yang cepat (Isbandi R, 2003 :292-293). Pendapat diatas sejalan dengan perubahan peristilahan yang digunakan oleh pemerintah khususnya di Negara kita yang pada awalnya menggunakan istilah “Pembangunan Masyarakat Desa”.

Hadad, salah seorang ilmuwan social di Indonesia melihat bahwa dari sudut pandang historis, istilah pembangunan pada intinya tidak berbeda dengan istilah perubahan. Dalam teori pembangunan dikenal beberapa pendekatan utama sebagaimana disebutka oleh Troeller yang mengungkapkan ilmu pendekatan tersebut yakni pendekatan pertumbuhan, pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigim ketergantungan, pendekatan kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian.

### 1. Pendekatan pertumbuhan

Awal bhasan tentang pembangunan antara 1950-1960 terasa ada optimisme dan harapan besar tentang konsep pembangunan akibat dinamika pertumbuhan ekonomi yang dialami Negara barat yang sudah melakukan industrilisasi dengan investasi “modal besar” guna mendongkrak sumberdaya dan potensi yang ada pada masyarakat. Berbekal teori bahwa pembangunan identik dengan pertumbuhan ekomoni di tempuh strategi pembangunan dengan sasaran tunggal untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itu di tempuh jalan pintas untuk membuka lebar-lebar investasi modal asing beserta teknologinya.

Pandangan diatas sebagaimana dikemukakan Rostow, mengasumsukan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagai konsekuensinya akan terjadi “*trickle down effect*”. Tetesan kebawah diharapkan juga akan mencapai lapisan rakyat kecil yang berada di desa maupun di daerah yang belum sempat

dibangun. Namun pada kenyataannya sungguh mengedihkan, karena meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional muncul persoalan lain berupa, pengangguran, peningkatan kejahatan, terjadi pula migrasi dari desa ke kota. Penduduk miskin di pedesaan yang tidak terampil menyerbu ke kota besar yang semakin mempersempit tingkat kerawanan kota. Sektor informal menjadi incaran bagi migrant yang kurang terampil ini. Beserta dengan keluarga dan anak-anak mereka membantu bekerja penjaga barang dagangan, pengamen, pedagang asong, dan pengemis.

Kepincangan sosial antara desa dan kota, mendorong terbentuknya “raja-raja” baru dalam dunia bisnis terutama yang mempunyai pendekatan dengan sumber informasi dan dana pembangunan. Kesenjaan pembangunan antara desa dengan kota inilah yang menjadi akar yang semakin berkembangnya kantong-kantong kemiskinan.

Akibat kesenjangan ini muncul para kapitalis baru yang mempunyai pendekatan dengan elit politik dan memperoleh kemudahan dan regulasi-regulasi yang ada, mereka disebut “*pseudocapitalists*” atau kapitalis semu karena menjadi kapitalis bukan karena kinerja mereka sendiri. Di samping itu tenaga-tenaga migran yang murah, oknum aparat yang memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang mereka awasi juga memberikan warna tersendiri pada pembangunan melalui pendekatan pertumbuhan ini. Meskipun demikian, hal seperti ini akan terlihat juga pada beberapa pendekatan yang lain dengan perbedaan intensitas dan kualitasnya.

## 2. Pendekatan pertumbuhan dan Pemerataan

*(Redistribution of growth Approach)*

Dalam rangka mengukur perkembangan pembangunan pada dasawarsa 1970-an, Adelman dan Moris, seorang ekonom Amerika Serikat, mengajukan tiga tipe indikator besar yaitu indikator sosial budaya, indikator politik, dan indikator ekonomi, dengan sub-sub indikatornya sebagai berikut :

- a. Indikator sub budaya mempunyai 13 sub indikator antara lain besar tidaknya sektor pertanian tradisional, tinggi rendahnya tingkat urbanisasi dan penting tidaknya kelas menengah.

- b. Indikator politik terdiri dari 17 sub seperti misalnya tingkat integrasi dan semangat persatuan, tingkat sentralisasi kekuasaan politik, tingkat partisipasi politik dan kebebasan kelompok oposan dan pers.
- c. Indikator ekonomi mempunyai 18 sub misalnya pendapatan domestik bruto (PDB) perkapita, keterbengkalian sumber daya alam, tingkat penanaman modal, dan modernisasi industry.

Dengan 48 sub indikator tersebut dapat dibedakan kelompok Negara belum berkembang, Negara sedang berkembang, dan Negara maju. Adelman dan Moris tidak percaya teori “ *trickle down effect*”, sebaliknya lebih menyakini terjadinya kesenjangan sosial akibat proses pemiskinan pada kelompok tersebut sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi atas dasar strategi pembangunan yang diterapkan di dunia Negara ketiga.

Menurut Hadad, kesenjangan sosial sangat terkait dengan pola masyarakat dalam mengelola kekayaan, pengetahuan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dari sanalah berawal mentalitas korup dan materialistic bagi pengambil keputusan khususnya untuk kepentingan yang berdampak menambah tingginya tingkat kemiskinan. Karena kepercayaan melemah dan aparat kehilangan kredibilitasnya dimata masyarakat. Masyarakat menjadi kesal, apatis dan tidak puas terhadap perilaku organisasi pemerintah. Terjadilah konflik vertikal antara masyarakat dengan petugas yang dapat menjalar menjadi konflik horizontal antar suku, agama, ras, dan golongan. Hal inilah yang terjadi di Indonesia yang secara perlahan tapi pasti berlangsung semenjak pertengahan dekade 1970 dan dirasakan akibatnya lebih mendalam pada era 1990 yang ditandai dengan krisis moneter yang di susul krisis lain yang multidimensi dan belum dapat diatasi sampai awal abad ke-21.

Pendekatan “Pertumbuhan dengan Pemerataan “ tidaklah banyak berbeda dengan pendekatan “pertumbuhan “ yang dilakukan perbaikan meskipun bersifat tambal sulam dengan memasukkan unsure pembangunan sosial. Masuknya unsure sosial dalam pembangunan, secara teoritis memang mudah dipahami tetapi dalam penerapannya sangat sulit karena masalah kemiskinan bukanlah sekedar masalah pendistribusian

barang/jasa kepada kelompok tertentu tetapi terkait dengan kekuasaan dan niat politik yang pada titik lain akan bertemu dengan masalah ketidakadilan ataupun kesenjangan social. Hal ini yang terlihat pada pembangunan dinegara dunia ketiga adalah realitas bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada hampir tidak menyentuh permasalahan pokok seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Keterlibatan oknum aparat yang korup, kelemahan system pengawasan atau system secara keseluruhan sangat merusak upaya pendistribusian pendapatan secara merata, dan dilain pihak lain masih dipertanyakan kesiapan masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan sebagaimana diperlukan dalam pendekatan pertumbuhan pemerataan.

### 3. Paradigma ketergantungan

Paradigm “ketergantungan” dalam teori pembangunan berawal dari pengalaman Negara-negara Amerika Latin. Konsep “dependencia” ini dipelopori oleh Cardoso pada 1970 karena melihat kelemahan dari konsep pembangunan yang ada yakni :

- a. Perlunya komponen-komponen dari luar negeri untuk menggerakkan kegiatan industry, yang menyebabkan ketergantungan dari segi teknologi dan capital
- b. Karena distribusi pendapatan di Amerika Latin menimbulkan pembatasan akan permintaan terhadap barang hasil industry, yang hanya mampu dinikmati sekelompok kecil kaum elite dan setelah permintaan terpenuhi maka proses pertumbuhan terhenti

Cardoso mengklaim bahwa Negara-negara “selatan” saat ini berada dalam kondisi ketergantungan terhadap Negara-negara “utara” dalam hal teknologi dan capital yang akhirnya akan mempengaruhi pembangunan dalam negeri Negara-negara dunia ketiga tersebut. Pada sisi lain kemauan politik yang positif dari Negara-negara pemilik modal untuk memberikan hibah atau bantuan keuangan serta teknologi kepada Negara belum/sedang berkembang seringkali hanya diutamakan pada sector-sektor yang dianggap strategis oleh Negara donor. Oleh karenanya Negara penerima bantuan pada akhirnya menjadi tergantung lagi pada Negara donor. Relasi yang tidak sehat ini pada titik tertentu memberikan sumbangan pada peningkatan kemiskinan Negara penerima bantuan. Hal ini terjadi karena hanya sekelompok anggota

masyarakat tertentu saja dinegara penerima bantuan yang mendapatkan keuntungan dimana kelompok ini sering berasal dari kelompok elitbisnis dan politis.

Paradigm ini berusaha mencari jawaban “mengapa bantuan besar” yang sudah diberikan tidak makna secara signifikan pada proses pembangunan, dan mengapa masih banyak Negara yang belum/sedang berkembang terutama di Amerika Serikat, belum mampu mengelola Pembangunan negaranya tanpa diberi dukungan oleh Negara donor ? “

Paradigma ini menunjukkan bahwa munculnya sifat ketergantungan merupakan penyebab terjadinya keterbelakanganmasyarakat, sehingga untuk membebaskannya diperlukan upaya “pembebasan” (liberation) dari rantai yang membelenggunya.

#### 4. Tata Ekonomi Internasional Baru

*(the new international Ecomonik order)*

Pada awal 1972, “the club of rome” memunculkan hasil studi yang berjudul “the limits of growth” yang memprediksi akan munculnya bencana pada kurun waktu seratus tahun yang akan datang, bila pertumbuhan penduduk, eksploitasi bahan mentah, peningkatan polusi, masih tetap sama dengan tingkat pertumbuhan pada 1970-an. Terkait dengan isu tersebut Megara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC menambahkan bahwa ancaman akan tetap muncul bila dominasi dari perusahaan multinasional terhadap-negara-negara yang belum/sedang berkembang tetap dalam kondisi yang sama dengan tahun 1970-an. Negara-negara OPEC ini mengemukakan bahwa akar stagnasi pertumbuhan ekonomi internasional berasal dari bagaimana Negara-negara industry tersebut mengeksploitasi hubungan kerja sama mereka dengan Negara dunia ketiga. Lebih jauh pada 1974 negara-negara OPEC yang telah mempunyai”kekuatan” yang lebih besar dari sebelumnya menyatakan akan perlunya “tata ekonomi internasional baru” guna mengatasi ketidakseimbangan hubungan antara Negara-negara”utara”dan “selatan”.

Usulan berikutnya didasarkan pada kebutuhan Negara-negara Selatan untuk mengelola sumber daya alam dan ekonomi sendiri. hal ini juga mencakup pada proses

pengambilan keputusan, prasyarat investasi, teknologi baru dan hubungan dagang. Sementara Negara-negara berkembang untuk melealisir tata ekonomi internasional baru slalu berhadapan dengan pikiran Negara maju yang cenderung menentang seperti yang dilakukan Amerika Serikat dengan menerapkan tiga strategi berikut :

- A. Strategi penolakan secara sepihak
- B. Startegi pengendoran, menyetujuan hal-hal kecil akan tetapi tidak terhadap yang pokok
- C. Strategi penyampaian yang bersifat samar dengan maksud menunda ataupun mengulur waktu.

Sebagai konsekuensi logis maka kontradiksi antara Negara selatan dan utara jelas semakin tajam dan kian sulit dijembatani karena dari pihak selatan sangat mendambakan keadilan internasional, sedangkan yang utara berusaha mempertahankan stabilitas, pertumbuhan dan “status quo” mereka. Sedangkan modal dan teknologi semakin berkembang dan berakar di Negara-negara selatan. Oleh karena itu, tata ekomoni yang baru ini sampai saat ini masih merupakan suaut impian bagi Negara-negara selatan.

#### 5. Pendekatan Kebutuhan Pokok

*(the Basic Needs Approach)*

*Banloche Pundation* di Argantina memperkenalkan pendekatan “kebutuhan pokok” sebagai salah satu alternative pelaksanaan pembangunan. Pendekatan inj tumbuh karena kebutuhan akan adanya teori pembangunan yang baru yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjaan social pada Negara-negara dunis ketiga. Dalam pendekatan ini terdapat proporsi bahwa” kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika mereka masih berada dibawah garis kemiskinan serta tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik”oleh karena itu, ada tiga sasaran berikut yang coba dikembangkan secara bersamaan.

- a. Membuka lapangan pekerjaan
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan
- c. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat

Setelah itu konsep pendekatan kebutuhan pokok diperluas dengan memasukan beberapa unsure kebutuhan pokok yang bersifat nonmaterial, yang bila digabungkan akan bisa

digunakan sebagai tolak ukur guna melihat kualitas kehidupan (quality of life) dari kelompok yang berbeda dari bawah garis kemiskinan. Sementara itu, Sujadmiko menyarankan bahwa pendekatan ini harus diterapkan secara komprehensif dan melibatkan masyarakat di pedesaan dan sector informal dengan mengembangkan potensi, kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mengorganisir diri serta membangun sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Hal yang menarik dari pendekatan ini adalah perhatiannya terhadap masyarakat yang berada dibawah kemiskinan dan penghargaan terhadap gerakan mereka yang ada di bawah.

Konsep dari Sujadmiko ini pada titik tertentu juga menjembatani pendekatan kebutuhan pokok dengan pendekatan kemandirian.

#### 6. Pendekatan Kemandirian (*the self-Reliance approach*)

Hadad menyatakan bahwa “pendekatan kemandirian” dalam berbagai literature juga dikenal dengan nama pendekatan “self sustained”. Pendekatan ini muncul sebagai konsekuensi logis dari berbagai upaya Negara dunia ketiga untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Negara industri.

Sudjadmiko melihat bahwa konsep kemandirian menyajikan dua perspektif :

- a. Penekanan yang lebih diutamakan pada hubungan timbal balik dan saling menguntungkan dalam perdagangan dan kerja sama pembangunan.
- b. Lebih mengandalkan pada kemampuan dan sumber daya sendiri untuk kemudian dipertemukan dengan perdebatan internasional tentang pembangunan.

Dalam lingkup nasional, kemandirian secara ekonomi bukanlah sesuatu strategi yang baru. Jepang dan Cina sering disebut sebagai contoh dan Negara yang lebih dulu menutup pintu dan menempuh status proses isolasi untuk sementara waktu, sebelum mencapai taraf pembangunan yang lebih seimbang dan membuka diri untuk kerja sama internasional. Penerapan konsep kemandirian itu membawa konsekuensi akan perlunya diterapkan pula pendekatan kebutuhan pokok bagi kelompok miskin, serta strategi pemerataan pendapatan dan hasil-hasil pembangunan.

Pelajaran pokok yang di dapat dari pencarian yang panjang dari pengembangan teori pembangunan adalah sifat tidak universal dari suatu teori yang dikembangkan oleh

para ahli dari "utara" sehingga tidak mungkin di ambil alih begitu saja untuk memecahkan masalah di dunia ketiga. Selain itu teori dan konsep pembangunan yang muncul terasa masih mencari format yang tepat, serta sedang dalam proses pengujian empiris, sehingga belum dapat dianggap sebagai teori alternative yang dapat berlaku universal.

Disamping pendekatan pembangunan Troeller, sebenarnya ada pula pendekatan lain, seperti pendekatan pembangunan social (*social development approach*), pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*), ataupun pendekatan pembangunan berkesimbangan (*sustainable development*).

Sumber:

( Buku : Dra. Risyanti Riza, Drs.H. Roesmidi, M.M.2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : ALQAPRINT JATINANGOR )

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

**Pertama**, upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Iaditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasimasalahnya dan sesuai kebutuhannya.

**Kedua**, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

**Ketiga**, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena

itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.

Selanjutnya untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat harus dapat dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasional maupun inkremental.

Dalam pengertian pertama, dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta pengalokasian sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu.

Dengan demikian, programnya harus bersifat nasional, dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak

yang berarti. Dengan pendekatan yang kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat. Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM adalah advokasi.

Pendekatan advokasi pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat (Davidoff, 1965). Model pendekatan ini mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam system hukum, di mana penasihat hukum berhubungan langsung dengan klien. Dengan demikian, pendekatan advokasi menekankan pada pendampingan dan kelompok masyarakat dan membantu mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumber daya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari kelompok masyarakat tersebut.

Pendekatan advokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan dan sistem nilai sendiri-sendiri. Masyarakat pada dasarnya bersifat majemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribusi secara merata dan akses keberbagai sumber daya tidak sama (Catanese and Snyder, 1986).

Kemajemukan atau *pluralisme* inilah yang perlu dipahami. Menurut paham ini kegagalan pemerintah sering terjadi karena memaksakan pemecahan masalah yang seragam kepada masyarakat yang realitanya terdiri dari kelompok-kelompok yang beragam. Ketidakpedulian terhadap heterogenitas masyarakat, mengakibatkan individu-individu tidak memiliki kemauan politik dan hanya segelintir elit yang terlibat dalam proses pembangunan.

Dalam jangka panjang diharapkan dengan pendekatan advokasi masyarakat mampu secara sadar terlibat dalam setiap tahapan dari proses pembangunan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Seringkali pendekatan advokasi diartikan pula sebagai salah satu bentuk “penyadaran” secara langsung kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan.

Makalah <http://fiqihisantoso.wordpress.com/2008/06/17/konsep-dan-metode-pemberdayaan-masyarakat-indonesia/>